

Alasan Malaysia Menghentikan Impor Sampah Plastik Tahun 2018

Ni Wayan Rahayuni Yodisari¹⁾, D.A. Wiwik Dharmiasih²⁾, A.A. Bagus Surya Widya Nugraha³⁾

¹²³⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: rahayuniyodisari1@gmail.com¹⁾, wiwikd@unud.ac.id²⁾, aabasuwinu@gmail.com³⁾

ABSTRACT

This research aims to describe the reason for Malaysia to stop importing plastic waste in 2018 by using a qualitative method. The import of Malaysia plastic waste is part of a foreign policy that has been going on for years to meet the need for secondary raw materials for several industrial sectors, especially manufacturing. Although the import of plastic waste has been carried out by Malaysia for many years and provides economic benefits. However, Malaysia ultimately chose to end its foreign policy regarding plastic waste imports in 2018. Therefore, Researcher uses one theory and one concept, which are foreign policy theory and economic security in order to answer the motive behind Malaysia to stop importing plastic waste in 2018. This research perceives that Malaysia's issued a foreign policy to stop the import of plastic waste has been based on considerations and reasons for achieving economic security.

Keywords: Malaysia, Economic Security, Foreign Policy, Import Cessation

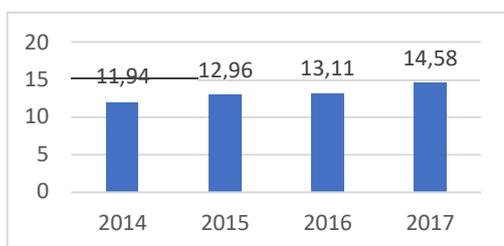
1. PENDAHULUAN

Malaysia merupakan salah satu negara yang menerima impor sampah plastik dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Kanada hingga Australia. Sampah plastik yang diimpor Malaysia digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku beberapa industri daur ulang di negara tersebut. Sampah plastik yang telah diimpor oleh Malaysia kemudian diolah menjadi bahan baku sekunder untuk beberapa industri di Malaysia dan salah satu industri yang memanfaatkan hasil daur ulang sampah plastik adalah industri manufaktur.

Industri daur ulang di Malaysia bahkan mampu mendatangkan keuntungan bagi negara tersebut yaitu sebesar 4 miliar RM USD (The Japan Times, 2018). Selain pada industri daur ulang, keuntungan juga diperoleh dari industri manufaktur Malaysia. Peningkatan nilai ekspor pada sektor manufaktur di Malaysia khususnya dimulai pada tahun 2014, nilai ekspor manufaktur Malaysia lebih dari RM 11 miliar seperti yang tampak pada Grafik 1.1. Ekspor industri manufaktur yang meningkat menyebabkan peningkatan bahan baku utama yaitu plastik khususnya sampah plastik karena hampir sebagian besar industri manufaktur Malaysia menggunakan sampah plastik daur ulang

untuk memenuhi kebutuhan bahan baku sekunder.

Grafik 1.1. Nilai Ekspor Manufaktur Malaysia Tahun 2014-2017 (dalam miliar RM)



Sumber: MPMA (2019)

Pada tahun 2018, Menteri Energi, Teknologi, Ilmu Pengetahuan, Perubahan Iklim dan Lingkungan Malaysia, Yeo Bee Yin, mengeluarkan kebijakan untuk mengembalikan sampah plastik yang diterima kembali ke negara asalnya. Kebijakan tersebut diungkapkan setelah ditemukannya 450 ton sampah plastik dalam sepuluh kontainer yang berasal dari negara-negara maju seperti Australia, Kanada, Jepang maupun Amerika Serikat. Dicetuskannya kebijakan untuk mengembalikan sampah plastik ke negara asalnya tidak selaras dengan keuntungan yang diperoleh oleh industri manufaktur dan industri daur ulang sampah plastik di Malaysia. Selain itu, Malaysia telah melakukan impor sampah plastik selama bertahun-tahun untuk memenuhi kebutuhan bahan baku beberapa sektor industri khususnya manufaktur namun tahun 2018 dengan jumlah impor sampah plastik yang tinggi justru Malaysia memilih untuk menghentikan kebijakan luar negeri

tersebut. Oleh karenanya, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian perihal alasan Malaysia menutup impor sampah plastik di tahun 2018.

2. KAJIAN PUSTAKA

Peneliti menggunakan dua literatur sebagai kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Literatur pertama adalah tulisan dari Katja B. Kleinberg & Benjamin O. Fordham (2013) yang berjudul *The Domestic Politics of Trade and Conflict*. Pada tulisan Kleinberg & Fordham (2013) secara umum membahas mengenai adanya kepentingan ekonomi yang timbul dari perdagangan internasional terhadap proses pembuatan kebijakan luar negeri khususnya pada ranah domestik. Adapun manfaat perdagangan dalam tulisan Kleinberg & Fordham (2013) disebutkan sebagai peluang bagi suatu negara untuk meningkatkan perekonomiannya. Kleinberg & Fordham (2013) juga menyebutkan bahwa perdagangan internasional oleh suatu negara umumnya dapat dilakukan melalui kegiatan ekspor maupun kegiatan impor. Selain itu, kegiatan ekspor maupun impor yang dilakukan oleh suatu negara dapat memengaruhi pembuat kebijakan pada tindakannya untuk menetapkan kebijakan luar negeri.

Secara umum tulisan Kleinberg & Fordham (2013) mampu membantu penelitian ini dalam menjelaskan pertimbangan yang dilakukan negara dalam mengeluarkan kebijakan luar negeri.

Pada tulisan Kleinberg & Fordham (2013) menyebutkan bahwa kebijakan luar negeri yang dibahas terkait dengan kegiatan ekonomi yaitu perdagangan. Kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara dapat melalui kegiatan ekspor maupun impor walau dalam pembahasan tulisan Kleinberg & Fordham (2013) lebih banyak mengacu pada kegiatan impor. Kebijakan luar negeri yang ditetapkan oleh suatu negara yaitu melalui kegiatan impor karena dianggap mampu mendatangkan keuntungan. Oleh karena itu, Kleinberg & Fordham (2013) mengungkapkan ketika kebijakan yang telah ditetapkan membawa kerugian dan mengancam keamanan ekonomi bagi negara, maka pembuat kebijakan dapat menghentikan kebijakan yang ada. Namun tulisan Kleinberg & Fordham (2013) belum dapat menjelaskan mengenai pentingnya negara untuk menjaga keamanan ekonominya.

Oleh karenanya, Peneliti menggunakan literatur kedua yaitu tulisan Vincent Cable (1995) yang berjudul *What is International Economic Security?*. Tulisan Cable (1995) secara umum membahas mengenai argumen dasar dari keamanan ekonomi secara kontemporer meliputi perlindungan terhadap persediaan lokal khususnya pada bahan baku atau produk-produk yang masih dapat digunakan, teknologi maupun pasar. Selain itu, Cable (1995) juga mengungkapkan bahwa semua hal yang berkaitan dengan ekonomi memiliki ketergantungan terhadap peningkatan komunikasi, aliran modal

bahkan perdagangan. Hal ini menyebabkan perekonomian menjadi hal yang rentan bagi suatu negara karena dianggap sebagai sumber untuk mendapatkan peluang atau keuntungan dalam meningkatkan standar hidup masyarakatnya seperti yang diungkapkan dalam tulisan Cable (1995). Perekonomian yang dianggap sebagai sebuah sumber keuntungan ataupun peluang menyebabkan negara berupaya untuk menjadikannya sebuah prioritas bukan sebagai ancaman yang harus dihindari.

Secara keseluruhan, literatur kedua dari tulisan Cable (1995) membantu penelitian ini dalam menjelaskan pentingnya untuk mewujudkan keamanan ekonomi. Pada dasarnya setiap negara memiliki pandangannya tersendiri dalam mendefinisikan keamanan ekonomi itu sendiri. Negara juga mewujudkan keamanan ekonomi menurut Cable (1995) yang dilakukan melalui berbagai upaya salah satunya adalah melalui peran industri. Cable (1995) mengungkapkan bahwa industri merupakan bagian penting dari ekonomi sehingga untuk mewujudkan keamanan ekonomi tentunya harus meningkatkan kualitas industrinya terlebih dahulu.

3. METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Negara sebagai level analisis dalam penelitian ini dengan unit analisis suatu negara yaitu Malaysia. Negara yang

menjadi objek penelitian dianalisis menggunakan dua kerangka pemikiran yaitu satu Teori Kebijakan Luar Negeri (*Foreign Policy Theory*) dan satu Konsep Keamanan Ekonomi (*Economic Security Concept*). Adapun data yang tercantum dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder seperti literatur hingga dokumen-dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pada teknik kepustakaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Impor Sampah Plastik Malaysia

Malaysia secara konsisten mengimpor bahan-bahan yang dapat didaur ulang seperti sampah plastik sekitar tahun 2010. Pemerintah Malaysia dalam melakukan impor menetapkan beberapa standar terkait sampah plastik yang diimpor. Menurut Staub (2018) ada beberapa standar yang ditetapkan Malaysia dalam mengimpor sampah plastik seperti kualitas sampah plastik harus dari sisa-sisa plastik yang berkualitas dan homogen atau setidaknya mampu didaur ulang. Malaysia dalam mengimpor sampah plastik tidak memiliki ketentuan khusus terkait dengan batas kontaminasi sampah plastik yang diijinkan untuk masuk ke dalam negeri. Selain pada beberapa standar tersebut, juga terdapat standar lainnya pada sampah plastik impor juga terkait dengan bahan sampah plastik harus dapat terurai secara hayati atau minimal tidak beracun. Standar sampah plastik yang diimpor juga harus

fokus pada kualitas dan ketentuan yang diinginkan oleh industri dalam negeri.

Setiap tahun Malaysia secara konsisten mengimpor sampah plastik dan sejak tahun 2010 jumlah impor sampah plastik Malaysia rata-rata mencapai lebih dari 80.000 ton. Jumlah impor sampah plastik ke Malaysia mengalami peningkatan tiga kali lipat sejak tahun 2016 dengan jumlah yang hampir mencapai 300.000 ton. Pada tahun 2018, jumlah impor sampah plastik Malaysia mencapai puncak tertinggi yaitu sekitar lebih dari 850.000 ton sampah plastik (Fernandez, 2020). Hal ini menyebabkan Malaysia menjadi negara dengan pengimpor sampah plastik terbesar di sekitar kawasan ASEAN seperti tampak dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Data Jumlah Impor Sampah Plastik ASEAN Tahun 2016 – 2018

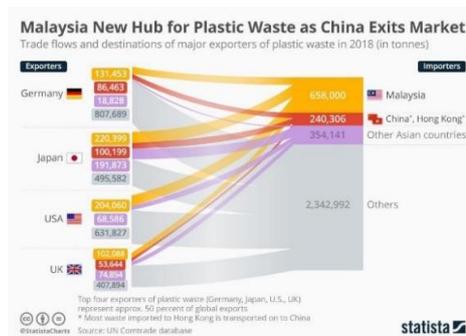
ASEAN Member States	2016	2017	2018
Malaysia	287,673	549,876	872,797
Thailand	69,487	152,244	481,381
Vietnam	347,840	659,057	492,839 ⁽⁹⁾
Indonesia	120,979	128,951	320,452
Myanmar	688	1,855	71,050 ⁽¹⁾
Philippines	4,650	4,267	11,761
Singapore	3,354	6,422	9,018
Lao People's Democratic Republic	1,181	3,008	4,791
Cambodia	647	1,685	1,688
Brunei Darussalam	30	116	185
ASEAN	836,529	1,507,481	2,265,962
% Global	5.38%	11%	27%
Global	15,553,548	13,410,919	8,358,867

Sumber: Fernandez (2020)

Jumlah impor sampah plastik Malaysia yang mencapai lebih dari 80.000 ton setiap tahunnya sebagian besar berasal dari negara-negara maju. Adapun empat negara maju yang terbilang sering mengekspor sampah plastiknya ke

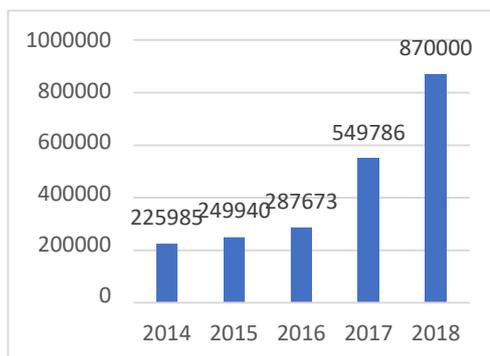
Malaysia dalam jumlah yang besar yaitu Jerman, Jepang, Amerika Serikat dan Inggris seperti tampak dalam Gambar 4.1. Jumlah ekspor sampah plastik dari keempat negara maju tersebut berbeda-beda, namun di tahun 2018 rata-rata jumlah sampah plastik yang diekspor ke Malaysia mencapai lebih dari 100.000 ton seperti terlihat dalam Grafik 4.2.

Gambar 4.1. Jumlah Ekspor Sampah Plastik dari Negara Maju ke Malaysia Tahun 2018



Sumber: Buchholz (2019)

Grafik 4.2. Peningkatan Impor Sampah plastik Malaysia dimulai Tahun 2014-2018



Sumber: Muller (2020)

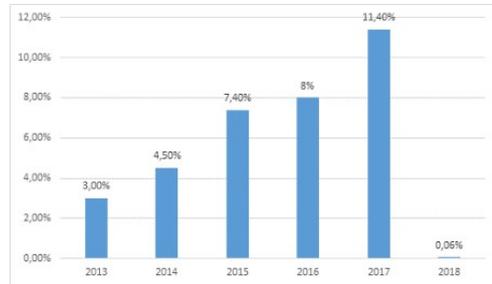
Setiap tahunnya, jumlah impor sampah plastik Malaysia mengalami peningkatan seperti Peneliti perlihatkan

dalam Grafik 4.2 di atas. Peningkatan jumlah impor sampah plastik Malaysia sejak 2016 hingga 2018 terbilang cukup tinggi. Tahun 2016, Malaysia mengimpor 20.000 ton setiap bulan dan meningkat hingga 110.000 ton setiap bulannya di tahun. Salah satu penyebab meningkatnya jumlah impor sampah plastik Malaysia adalah karena tingginya tingkat konsumsi khususnya pada kemasan plastik per kapita setiap tahunnya. Konsumsi kemasan plastik Malaysia mencapai 16,78 kg setiap orang karena produk-produk plastik terbilang murah dan bersifat praktis (Kamel, 2020).

4.2 Kegunaan Impor Sampah Plastik Bagi Malaysia

Pemerintah Malaysia juga pada dasarnya telah mengupayakan untuk meningkatkan daur ulang pada sampah plastik lokal. Adapun standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Malaysia pada tingkat daur ulang sampah plastik lokal adalah minimal mencapai 15 persen agar lebih dapat memenuhi jumlah kebutuhan bahan baku sehingga mampu mengurangi jumlah impor (Jereme *et.al*, 2015). Namun tingkat daur ulang pada sampah plastik lokal Malaysia masih dibawah 15 persen bahkan ditahun 2018 hanya sekitar 0,06 persen seperti yang tampak pada Grafik 4.3. Hal ini juga menyulitkan Malaysia dalam memenuhi kebutuhan bahan baku sehingga impor menjadi cara yang digunakan karena mudah mendapatkan bahan dengan mudah.

Grafik 4.3. Tingkat Daur Ulang Sampah Plastik Lokal Malaysia Tahun 2013 – 2018



Sumber: Jasmin & Kin (2019)

Impor sampah plastik sangat berguna bagi Malaysia dalam memenuhi jumlah kebutuhan bahan baku untuk didaur ulang. Tingkat daur ulang Malaysia yang masih rendah juga disebabkan karena sistem daur ulang pada sampah plastik lokal yang kurang efisien dalam mengumpulkan semua sampah plastik di TPA. Hal ini disebabkan karena Malaysia memiliki jumlah TPA yang sanitasi terbatas sehingga banyak sampah plastik yang terkontaminasi karena tidak disortir dengan tepat (Leoi, 2019). Sampah plastik yang terkontaminasi ketika didaur ulang membutuhkan biaya yang lebih tinggi namun ketika bahan-bahan tersebut dijual justru lebih murah. Oleh karena itu, impor sampah plastik menjadi berguna bagi Malaysia dalam membantu memenuhi jumlah kebutuhan bahan baku juga lebih mudah untuk mendapatkan sampah plastik berkualitas dengan nilai tinggi sehingga dalam mendaur ulang tidak membutuhkan biaya produksi yang tinggi (The Guardian, 2019).

4.3 Alasan Penghentian Impor Sampah Plastik Malaysia

Pada tahun 2018, Malaysia menerima impor sampah plastik yang berkualitas buruk dibanding dengan impor tahun-tahun sebelumnya. Hampir seluruh impor sampah plastik yang masuk ke Malaysia telah terkontaminasi, tidak homogen dan bahkan tidak dapat didaur ulang. Hal itu berawal dari kebijakan Tiongkok yang menutup impor sampah plastiknya di awal bulan Januari tahun 2018 dan menimbulkan krisis global dalam aliran sampah plastik.

Malaysia mengawali dengan mengeluarkan peringatan bagi negara-negara yang mengirim sampah plastik terkontaminasi ke Malaysia untuk mengambil sampah plastiknya kembali. Namun tindakan awal yang dilakukan tidak terlalu berpengaruh, sehingga Pemerintah Malaysia kemudian mengambil langkah selanjutnya dengan mengirim kembali semua sampah plastik yang terkontaminasi ke negara-negara asal. Pada tahap pertama ada 13 negara yang dituju Malaysia untuk mengambil kembali sampah plastik yang telah terkontaminasi, yaitu; Perancis, Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Spanyol, Hong Kong, Jepang, Singapura, Portugal, Cina, Bangladesh, Sri Lanka dan Lithuania. Total keseluruhan sampah plastik yang dikirim kembali oleh Malaysia pada tahap pertama berjumlah 150 kontainer dengan jumlah kontainer setiap negara berbeda-beda seperti yang tampak pada Tabel 4.2. Tindakan ini terus dilakukan oleh Malaysia selama tahun 2018

hingga sampah plastik impor yang telah terkontaminasi dan tidak dapat didaur ulang berhasil sepenuhnya dikirim kembali ke semua negara asal. Pemerintah Malaysia kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan impor sampah plastik pada tahun 2018.

Tabel 4.2. Jumlah Kontainer Pengembalian Sampah Plastik Oleh Malaysia ke Setiap Negara Pengeksport Tahap I Tahun 2018

Bil.	Negara Pengeksport	Jumlah Kontena
1	Perancis	43
2	United Kingdom	42
3	Amerika Syarikat	17
4	Kanada	11
5	Sepanyol	10
6	Hong Kong	9
7	Jepun	5
8	Singapura	4
9	Portugal	3
10	China	3
11	Bangladesh	1
12	Sri Lanka	1
13	Lithuania	1
	Jumlah	150

Sumber: Cole (2020)

Kebijakan penghentian impor sampah plastik merupakan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia untuk mencapai keamanan ekonomi negaranya. Pertimbangan yang menjadi dasar Pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan tersebut adalah; (1) Sampah plastik yang diimpor tidak dapat didaur ulang menjadi bahan baku sekunder karena telah terkontaminasi, kualitas sampah plastik yang diterima sangat buruk bahkan tidak lagi berguna khususnya bagi beberapa sektor industri di Malaysia (Bernama, 2019). (2) Impor sampah plastik Malaysia tidak lagi memberi keuntungan,

bahkan merugikan beberapa sektor industri yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi Malaysia (Lakshmi & Chow, 2018). Hal itu sesuai dengan argumen Kleinberg & Fordham (2013) serta Kahler (2004) yang menyebutkan bahwa ketika kebijakan impor atau ekspor tidak lagi menguntungkan maka negara dapat menghentikan kebijakan tersebut.

Sampah plastik yang diimpor Malaysia tahun 2018 mencapai 870.000 ton dengan nilai impor lebih dari RM 483 juta (Chu, 2018). Namun total sampah plastik yang dapat digunakan terbilang kecil yaitu hanya mencapai 9 persen. Jumlah sampah plastik yang diimpor hampir 91 persen telah terkontaminasi sehingga menyebabkan Pemerintah Malaysia menanggung beban biaya yang besar untuk melakukan pemindahan hingga pembersihan sampah plastik impor yang tidak dapat didaur ulang atau yang telah terkontaminasi. Selain itu, banyaknya jumlah sampah plastik impor Malaysia yang terkontaminasi juga berdampak pada pemenuhan kebutuhan bahan baku bagi beberapa sektor industri khususnya industri manufaktur maupun industri daur ulang.

Adapun biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia pada tahun 2018 akibat impor sampah plastik Malaysia yang terkontaminasi meliputi biaya pembersihan sampah plastik sebesar RM 200.000 untuk setiap ton sampah plastik. Biaya pembersihan ini dikeluarkan oleh Pemerintah Malaysia setiap bulan untuk membersihkan sampah plastik impor yang

tidak bisa didaur ulang yang terdapat di beberapa lahan Malaysia. Selain itu, Pemerintah Malaysia juga di tahun 2018 mengeluarkan biaya lebih dari RM 40 untuk memindahkan setiap ton sampah plastik impor beracun yang jumlahnya bahkan lebih dari 700.000 ton ke TPA (Leoi, 2019). Hal ini didasari karena sampah plastik beracun yang masuk ke Malaysia hampir 80 persen dibawa ke TPA maupun diletakkan di lahan terbuka. TPA Malaysia hanya memiliki daya tampung terbatas sekitar 600 ton setiap harinya. Meskipun sebagian besar sampah akhirnya berhasil dikirimkan kembali ke negara asal, ada lebih dari 15.000 sampah plastik yang tidak diketahui sumbernya sehingga tidak dapat dikembalikan (Tan, 2011).

Pemerintah Malaysia juga ingin melindungi sampah plastik lokal yang masih dapat didaur ulang. Hal ini sejalan dengan penelitian Kahler (2004) dan Cable (1995) yang menyebutkan bahwa keamanan ekonomi juga mencangkup tentang perlindungan terhadap persediaan lokal yang masih dapat digunakan. Daya tampung TPA yang terbatas menyebabkan hanya sekitar 20 persen total sampah plastik lokal yang dapat ditampung, sementara hampir 80 persen sisanya telah terkontaminasi sampah plastik impor (Chu, 2018). Pemerintah Malaysia bahkan harus memindahkan sisa sampah plastik dari TPA ke pabrik-pabrik semen agar sampah plastik lokal di TPA yang masih dapat digunakan tidak ikut tercemar. Namun pemindahan tersebut juga memerlukan

biaya yang tinggi, bahkan Pemerintah Malaysia pada awal tahun 2018 mengeluarkan dana lebih dari RM 2,5 juta (Bendix, 2019).

Selain itu, impor sampah plastik yang dilakukan Malaysia di tahun 2018 juga telah memicu terjadinya perdagangan ilegal dan penampungan limbah beracun. Penyelundupan sampah plastik beracun banyak dilakukan oleh pabrik ilegal milik Cina yang jumlahnya mencapai lebih dari 100 pabrik di Malaysia seperti yang tampak pada Gambar 4.2. Pabrik daur ulang ilegal tersebut menyebabkan kekacauan pada industri lokal karena letaknya yang saling berdekatan dan sampah plastik beracun yang diselundupkan banyak dibuang ke sumber air (Packaging, 2020). Hal ini menyebabkan beberapa industri, salah satunya perikanan udang, harus dihentikan akibat airnya yang tercemar (Lakshmi & Chow, 2018; Packaging, 2020).

Gambar 4.2. Penyebaran Pabrik Ilegal Daur Ulang Sampah Plastik di Malaysia Tahun 2018



Sumber: Ismail (2019)

Alasan Pemerintah Malaysia dalam menghentikan impor sampah plastik di

tahun 2018 semakin menguat ketika sektor penting Malaysia yaitu manufaktur dan industri daur ulang ikut mengalami kerugian. Tulisan Cable (1995) menyebutkan bahwa industri merupakan hal penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara sehingga harus terus ditingkatkan kualitasnya demi meningkatkan keuntungan. Tahun 2018, industri manufaktur di Malaysia banyak menerima kerugian khususnya pada produk pengemasan karena hanya sembilan persen sampah plastik impor yang bersih dan dapat didaur ulang. Hal ini menyebabkan industri manufaktur harus menanggung insentif sekitar 7,2 miliar USD untuk membersihkan sampah plastik beracun yang sudah diimpor (Crawford & Warren, 2020). Selain itu, kecilnya jumlah sampah plastik impor yang bisa didaur ulang berpengaruh pada harga bahan baku pada industri manufaktur yang tinggi sehingga menyebabkan biaya produksi yang semakin tinggi. Adapun biaya bahan baku industri manufaktur Malaysia tahun 2018 mencapai 300 USD per ton sampah plastik yang didaur ulang (Waste Management, 2018).

Industri daur ulang lokal Malaysia harus menanggung kerugian hampir mencapai 40 juta USD karena harus mengganti bahan baku dan juga mengeluarkan insentif lebih dari 7 miliar dollar USD untuk membersihkan sampah plastik beracun karena hanya sembilan persen sampah plastik impor yang dapat didaur ulang (Crawford & Warren, 2020;

Waste Management, 2018). Penurunan keuntungan tersebut juga disebabkan oleh denda yang harus dibayarkan karena keterlambatan pengiriman produk-produk berbahan daur ulang plastik akibat kurangnya bahan sampah plastik.

Pemerintah Malaysia mengharapkan kebijakan penghentian impor sampah plastik tahun 2018 dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekuler. Selain itu, adanya kebijakan luar negeri untuk menghentikan impor sampah plastik juga ditujukan untuk mendorong industri lokal maupun masyarakat Malaysia untuk dapat lebih mengolah sampah plastik lokal secara tepat untuk dijadikan sebagai bisnis menguntungkan (Bengali, 2018). Oleh sebab itu, ditetapkannya kebijakan luar negeri ini juga telah berdasarkan pertimbangan dengan alasan yang dapat mengancam keamanan ekonomi Malaysia apabila kebijakan impor sampah plastik tetap dijalankan di tahun 2018.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini mempertanyakan alasan Malaysia menghentikan impor sampah plastik pada tahun 2018. Peneliti memfokuskan pada kepentingan nasional Malaysia, terutama pada keamanan ekonomi. Hasil penelitian ini memang menunjukkan bahwa beban ekonomi yang ditanggung oleh Malaysia begitu besar hingga harus menghentikan kebijakan luar negeri yang sebelumnya menguntungkan industri manufaktur Malaysia. Penelitian ini tidak melihat faktor-faktor lain yang

sekiranya juga memengaruhi pengambilan keputusan untuk menghentikan kebijakan impor sampah plastik Malaysia pada tahun 2018. Oleh karenanya, Peneliti menyarankan agar bisa dilakukan penelitian lain yang melihat faktor-faktor lain seperti lingkungan, politik, dan lainnya, yang juga memengaruhi pengambilan kebijakan tersebut.

Setiap negara dalam menjalankan kebijakan luar negeri mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang diperoleh terkait kepentingan nasionalnya. Ketika kebijakan luar negeri yang dikeluarkan justru menimbulkan beban ekonomi, maka pemerintah cenderung mengeluarkan kebijakan luar negeri yang berbeda atau menghentikan kebijakan luar negeri yang berjalan. Hal tersebut tergambar jelas dalam tindakan yang diambil Malaysia untuk menghentikan impor sampah plastik tahun 2018 karena merugikan negara secara ekonomi terutama bagi industri manufaktur.

6. DAFTAR PUSTAKA

Ebook:

MPMA. (2019). *Performance of The Malaysian Plastics Industry 2018*. Malaysia: Malaysian Plastics Manufactureres Association.

Jurnal:

Cable, Vincent. (1995). *International Affairs*, Vol. 71, No. 2. *What is International Economic Security*, 305-324.

Jasmin F, Alyssa & Kin E, Wong. (2019). *Khazanah Research Institute. Plastic: An Undegradable Problem*, 1-16.

Jereme A, Innocent *et.al.* (2015). *Indian Journal of Education and Information Management*, Vol. 4, No. 1. *Waste Recycling in Malaysia: Transition from Developing to Developed Country*, 1-14.

Kahler, Miles. (2004). *The Pacific Review*, Vol. 17, No. 4. *Economic Security in An Era of Globalization: Definition and Provision*, 485-502.

Kleinberg B, Katja & Fordham O, Benjamin. (2013). *International Studies Quarterly. The Domestic Politics of Trade and Conflict*, 605-619.

Media Daring:

Ananthalakshmi A & Chow, Emily. (2018). *Swamped with Plastic Waste: Malaysia Struggles as Global Scrap Piles Up*. Retrieved 2020, from <https://jakartaglobe.id/news/malaysia-a-struggles-as-global-scrap-piles-up/>

Bendix, Aria. (2019). *Staggering Photos Show One Smell Town Covered in 19.000 Tons of Plastic Waste*. Retrieved 2020, from <https://www.businessinsider.com/malaysia-town-plastic-waste-china-photos-2019-2?r=US&IR=T>

Bengali, Shashank. (2018). *How Heaps of US Plastic Waste Landed in Malaysia, Broken Down by Workers Earning \$10 A Day*. Retrieved 2020, from <https://www.latimes.com/world/asia/la-fg-malaysia-plastic-2018-story.html>

Bernama. (2019). *Malaysia Polluted by Imported Waste*. Retrieved 2020, from <https://worldnewsday.org/malaysia-polluted-by-imported-waste/>

Buchholz, Katharina. (2019). *Malaysia New Hub for Plastic Waste as China Exits Market*. Retrieved 2020, from <https://www.statista.com/chart/18451/trade-flows-of-major-exporters-of-plastic-waste/#:~:text=Malaysia%20emerged%20as%20a%20new,plastic%20scrap%20in%20early%202018.>

- Chu M, Mei. (2018). *Greenpeace Malaysia: Country has Become The World's Rubbish Bin*. Retrieved 2020, from <https://www.thestar.com.my/news/nation/2018/11/27/greenpeace-malaysia-country-has-become-the-worlds-rubbish-bin/>
- Cole, Rob. (2020). *Malaysia Return 150 Containers of Illegal Plastic Waste to Developed Countries*. Retrieved 2020, from <https://resource.co/article/malaysia-returns-150-containers-illegal-plastic-waste-developed-countries#:~:text=Malaysia%20returns%20150%20containers%20of%20illegal%20plastic%20waste%20to%20developed%20countries,-By%20Rob%20Cole&text=The%20Malaysian%20Government%20has%20announced,of%20origin%2C%20including%20the%20UK.&text=Shipping%20containers%20at%20Malaysia's%20Port%20Klang.>
- Crawford, Alan & Warren, Hayley. (2020). *China Upended The Politics of Plastic and The World is Still Reeling*. Retrieved 2020, from <https://www.bloomberg.com/graphics/2020-world-plastic-waste/>
- Fernandez A, Hannah. (2020). *If The Philippines Banned Waste Imports, Why is it Still The World's Dumping Ground?* Retrieved 2020, from <https://www.eco-business.com/news/if-the-philippines-banned-waste-imports-why-is-it-still-the-worlds-dumping-ground/>
- Ismail. (2019). *Importation of Plastic Waste to Malaysia*. Retrieved 2020, from <https://www.impel.eu/wp-content/uploads/2019/10/3-Importation-of-plastic-waste-to-Malaysia.pdf>
- Kamel, Harizah. (2020). *Malaysia Tops The List on Plastic Packaging Consumption, Says WWF*. Retrieved 2020, from [https://themalaysianreserve.com/2020/02/18/malaysia-tops-the-list-on-plastic-packaging-consumption-says-wwf/#:~:text=Malaysia%20tops%20the%20list%20on%20plastic%20packaging%20consumption%2C%20says%20WWF&text=MALAYSIA'S%20annual%20per%20capita%20plastic,Fund%20\(WWF\)%20for%20Nature.](https://themalaysianreserve.com/2020/02/18/malaysia-tops-the-list-on-plastic-packaging-consumption-says-wwf/#:~:text=Malaysia%20tops%20the%20list%20on%20plastic%20packaging%20consumption%2C%20says%20WWF&text=MALAYSIA'S%20annual%20per%20capita%20plastic,Fund%20(WWF)%20for%20Nature.)
- Leoi L, Sim. (2019). *Malaysia is Overflowing with Waste and We're Running Out of Options*. Retrieved 2020, from <https://www.thestar.com.my/lifestyle/living/2019/07/16/plastic-waste-landfills/>
- Muller J. (2020). *Total Volume of Plastic Waste Imported into Malaysia from 2010 to 2017*. Retrieved 2020, from <https://www.statista.com/statistics/960243/volume-plastic-waste-imports-malaysia/#:~:text=This%20statistic%20shows%20the%20total,549%2C786%20metric%20tons%20in%202017.>
- Packaging. (2020). *Malaysia Returns Plastic Waste to Exporting Countries*. Retrieved 2020, from <https://www.packaging-gateway.com/news/malaysia-returns-plastic-waste-exporting-countries/>
- Tan, David. (2011). *Plastics Firms See Demand Rise*. Retrieved 2020, from <https://www.thestar.com.my/business/business-news/2011/03/28/plastics-firms-see-demand-rise>
- The Japan Times. (2018). *Illegal Factories Cash in on Malaysia's Plastics Recycling Plan*. Retrieved 2020, from https://www.japantimes.co.jp/news/2018/10/26/asia-pacific/illegal-factories-cash-malysias-plastics-recycling-plan/#.XnnUR_n7TDf
- Waste Management. (2018). *Malaysia, Thailand and Vietnam Waste Imports Crackdown*. Retrieved 2020, from <https://wastemanagementreview.com.au/battling-sovereign-risk/>